

## MENJAGA WAJAH, MENAMPILKAN KUASA: POLITIK PENYELAMATAN MUKA DALAM POLITIK LUAR NEGERI PRABOWO

Bonifasius Endo Gauh Perdana<sup>1</sup>, Firya Qurratu'ain Abisono<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Universitas Tidar, Magelang, Indonesia

<sup>2</sup>Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia

Email: [endo@untidar.ac.id](mailto:endo@untidar.ac.id)

### Abstrak

Politik luar negeri Indonesia pada masa pemerintahan Prabowo Subianto ditandai oleh intensitas diplomasi yang tinggi, personalisasi kepemimpinan, serta penggunaan simbol dan performa politik yang kuat di tingkat domestik maupun internasional. Namun, kajian mengenai fenomena tersebut selama ini lebih banyak menjelaskan perubahan politik luar negeri Indonesia melalui perspektif strategi geopolitik, diplomasi middle power, atau prinsip politik luar negeri bebas aktif. Artikel ini berargumen bahwa pendekatan tersebut belum cukup menjelaskan dimensi simbolik dalam praktik politik luar negeri Prabowo. Dengan menggunakan konsep politik penyelamatan muka (*face-saving politics*), penelitian ini menganalisis bagaimana politik luar negeri berfungsi sebagai strategi mempertahankan legitimasi politik, mengelola kritik domestik, dan menampilkan otoritas di hadapan aktor internasional. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif interpretatif melalui telaah literatur, analisis wacana politik, serta penelaahan terhadap sejumlah kontroversi kebijakan luar negeri. Hasil kajian menunjukkan bahwa praktik *face-saving* dijalankan melalui performa diplomatik, konsolidasi elite, dan penegasan simbolik atas kesetaraan kedaulatan. Politik luar negeri pada akhirnya tidak hanya menjadi instrumen pencapaian kepentingan nasional, tetapi juga medium mempertahankan citra kepemimpinan dan legitimasi kekuasaan. Studi ini menawarkan politik penyelamatan muka sebagai kerangka analitis untuk memahami dimensi performatif dalam politik luar negeri Indonesia kontemporer.

**Kata Kunci:** Politik Penyelamatan Muka; Kebijakan Luar Negeri; Performa Politik; Prabowo Subianto.

### Abstract

*Indonesia's foreign policy under President Prabowo Subianto has been characterized by increasingly intensive diplomatic engagements, personalized leadership, and strong symbolic performances in both domestic and international arenas. However, existing discussions predominantly interpret these developments through geopolitical strategy, middle power diplomacy, or Indonesia's long-standing free and active foreign policy doctrine. This article argues that such perspectives remain insufficient to explain the symbolic dimension of Prabowo's foreign policy practices. Using the concept of face-saving politics, this study examines how foreign policy functions as a strategy to preserve political legitimacy, manage domestic criticism, and project authority before international audiences. Employing a qualitative interpretive approach through literature review, political discourse analysis, and examination of selected foreign policy controversies, this article finds that face-saving practices operate through diplomatic performances, elite consolidation, and symbolic assertions of sovereign equality. Foreign policy therefore serves not only as an instrument to pursue national interests, but also as a medium for maintaining leadership image and political authority. This study contributes to the literature by positioning face-saving as an analytical*

*framework for understanding the performative and symbolic dimensions of Indonesia's contemporary foreign policy.*

**Keywords:** *Face-Saving Politics, Foreign Policy, Political Performance, Prabowo Subianto.*

## A. PENDAHULUAN

Politik luar negeri Indonesia secara historis dibangun di atas prinsip bebas aktif, yaitu upaya mempertahankan otonomi politik melalui keterlibatan dalam isu internasional tanpa terikat pada blok kekuatan tertentu. Prinsip tersebut berkembang menjadi identitas diplomasi Indonesia sekaligus landasan normatif dalam merespons perubahan tatanan global (Umar, 2026). Namun demikian, praktik politik luar negeri Indonesia tidak selalu bersifat statis karena dipengaruhi oleh dinamika domestik, perubahan lingkungan internasional, serta karakter kepemimpinan politik yang sedang berkuasa (Nugroho, 2026). Laksmana (2011) menunjukkan bahwa meningkatnya posisi Indonesia di tingkat regional dan global turut mendorong perubahan cara negara memproyeksikan pengaruh dan identitas internasionalnya. Dengan demikian, politik luar negeri tidak hanya merefleksikan kepentingan strategis negara, tetapi juga bagaimana negara dan pemimpinnya membangun legitimasi serta pengakuan di ruang internasional.

Kecenderungan tersebut semakin terlihat pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Sejak ditetapkan sebagai presiden terpilih hingga awal masa pemerintahannya, Prabowo menunjukkan intensitas diplomasi luar negeri yang tinggi melalui kunjungan bilateral, pertemuan dengan pemimpin negara besar, serta keterlibatan aktif dalam berbagai isu geopolitik dan keamanan internasional (CNBC Indonesia, 2025). Aktivitas diplomatik tersebut memperlihatkan upaya Indonesia mempertahankan relevansi di tengah meningkatnya persaingan kekuatan global. Pada saat yang sama, gaya diplomasi yang lebih personal memunculkan perdebatan mengenai arah politik luar negeri Indonesia, terutama terkait dominasi kepemimpinan presiden dalam pembentukan citra dan representasi kebijakan luar negeri (Sulaiman, 2025).

Perubahan orientasi politik luar negeri sering kali berkaitan dengan meningkatnya peran individu pemimpin dalam proses pengambilan keputusan. Kepemimpinan dipahami sebagai salah satu tingkat analisis penting karena preferensi, persepsi, dan tujuan individu dapat memengaruhi arah kebijakan negara (Singer, 1961). Hermann (2001) menambahkan bahwa struktur pengambilan keputusan dan karakter pemimpin berkontribusi terhadap bagaimana kebijakan luar negeri dirumuskan serta dipresentasikan kepada publik. Dengan kata lain, politik luar negeri tidak sepenuhnya merupakan produk kepentingan negara yang abstrak, tetapi juga dapat menjadi representasi gaya kepemimpinan politik.

Dalam konteks Indonesia, perhatian terhadap dimensi kepemimpinan dalam politik luar negeri menjadi penting ketika diplomasi semakin terlihat sebagai aktivitas simbolik dan personal. Berbagai kunjungan internasional, pertemuan dengan pemimpin dunia, maupun respons terhadap kritik kebijakan luar negeri menunjukkan bahwa diplomasi tidak hanya menghasilkan kebijakan substantif, tetapi juga memproduksi citra, legitimasi, dan persepsi publik (Umar, 2026). Situasi tersebut mengindikasikan bahwa politik luar negeri dapat berfungsi sebagai arena performatif politik, tempat pemimpin menampilkan kapasitas, otoritas, dan posisi negaranya di hadapan audiens domestik maupun internasional.

Kajian mengenai politik luar negeri Indonesia selama ini lebih banyak menekankan aspek geopolitik, diplomasi *middle power*, atau strategi mempertahankan posisi Indonesia dalam tatanan internasional. Karim (2018) menunjukkan bahwa perilaku negara *middle power* tidak hanya ditentukan oleh kemampuan material, tetapi juga berkaitan dengan upaya memperoleh pengakuan (*recognition*) dan status internasional. Dalam penelitian lain, Karim (2021) menjelaskan bahwa legitimasi peran internasional Indonesia dibangun melalui proses

pembentukan identitas dan justifikasi politik. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa simbol, pengakuan, dan legitimasi memiliki posisi penting dalam praktik politik luar negeri.

Meskipun demikian, penjelasan mengenai status internasional dan kepemimpinan belum sepenuhnya menjawab bagaimana legitimasi politik dipertahankan melalui simbol, citra, dan pengelolaan kritik. Untuk memahami aspek tersebut, konsep *face-saving* atau politik penyelamatan muka menjadi relevan digunakan. Goffman (1967) mendefinisikan *face* sebagai citra positif yang ingin dipertahankan seseorang dalam interaksi sosial. Upaya menjaga citra tersebut dari kehilangan legitimasi atau rasa malu di hadapan publik kemudian disebut sebagai *face-saving*. Dalam konteks hubungan internasional, konsep ini dikembangkan oleh Nair (2019) yang menjelaskan bahwa *face-saving* dalam diplomasi bukan sekadar karakter budaya Asia, melainkan mekanisme politik untuk mempertahankan otoritas, menjaga keteraturan sosial, dan menghindari konflik terbuka.

Perspektif Nair (2019) penting karena memperluas pemahaman *face-saving* dari interaksi interpersonal menuju praktik diplomasi dan relasi kuasa. Dalam lingkungan internasional yang hierarkis, praktik *face-saving* memungkinkan aktor politik mempertahankan legitimasi sekaligus menampilkan kesetaraan kedaulatan di hadapan aktor lain. Dengan demikian, politik penyelamatan muka tidak hanya berhubungan dengan perlindungan citra individu, tetapi juga produksi legitimasi politik dan pengelolaan otoritas.

Relevansi konsep tersebut terlihat ketika kebijakan luar negeri tidak hanya diperdebatkan pada tingkat substansi, tetapi juga pada bagaimana kritik dikelola dan legitimasi dipertahankan. Berbagai kontroversi kebijakan luar negeri pada awal pemerintahan Prabowo menunjukkan bahwa respons terhadap kritik elite politik maupun diplomat sering kali menjadi bagian dari dinamika diplomasi itu sendiri. Situasi ini mengindikasikan kemungkinan bahwa politik luar negeri berfungsi secara ganda: sebagai instrumen mencapai kepentingan nasional sekaligus sebagai mekanisme mempertahankan otoritas politik.

Walaupun penelitian mengenai politik luar negeri Indonesia telah berkembang, kajian yang menghubungkan *face-saving*, legitimasi kepemimpinan, dan performa politik luar negeri masih terbatas. Sebagian besar studi menitikberatkan pada orientasi geopolitik, perilaku *middle power*, atau perubahan strategi diplomasi, sementara dimensi simbolik dalam praktik kebijakan luar negeri relatif belum banyak dieksplorasi. Kekosongan tersebut menjadi penting mengingat dinamika politik kontemporer menunjukkan bahwa legitimasi pemimpin semakin diproduksi melalui representasi simbolik, komunikasi politik, dan performa publik.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana politik penyelamatan muka (*face-saving politics*) beroperasi dalam politik luar negeri Presiden Prabowo Subianto. Artikel ini berargumen bahwa politik luar negeri tidak hanya dijalankan sebagai instrumen pencapaian kepentingan nasional, tetapi juga sebagai arena performatif untuk mempertahankan legitimasi, menampilkan otoritas, dan memperoleh pengakuan politik. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif interpretatif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap studi politik luar negeri Indonesia melalui penggunaan *face-saving* sebagai kerangka analisis dalam memahami dimensi simbolik dan performatif diplomasi kontemporer.

## B. TINJAUAN PUSTAA

### 1. Politik Penyelamatan Muka (*Face-Saving*) sebagai Mekanisme Legitimasi

Konsep *face* pada awalnya berkembang dalam kajian sosiologi interaksi untuk menjelaskan bagaimana individu mempertahankan citra positif dirinya di hadapan orang lain. Goffman (1967) menjelaskan bahwa interaksi sosial selalu melibatkan upaya aktor menjaga *face*, yaitu nilai sosial positif yang diklaim seseorang berdasarkan penilaian lingkungan sekitarnya. Kehilangan *face* dapat menghasilkan rasa malu, penurunan legitimasi, atau

terganggunya posisi sosial seseorang. Oleh karena itu, berbagai bentuk perilaku sosial sering kali diarahkan untuk melindungi citra tersebut melalui praktik *face-saving*.

Dalam perspektif Goffman, *face-saving* bukan hanya tindakan defensif setelah terjadi ancaman terhadap reputasi, tetapi bagian dari proses mempertahankan keteraturan interaksi sosial. Individu secara aktif membangun strategi agar citra dirinya tetap diterima dan memperoleh pengakuan dari audiens sosial. Dengan demikian, *face-saving* berkaitan erat dengan legitimasi dan relasi kuasa karena kemampuan mempertahankan citra sering menentukan posisi seseorang dalam struktur sosial.

Perkembangan konsep ini kemudian meluas ke kajian hubungan internasional dan diplomasi. Nair (2019) mengkritik kecenderungan memahami *face-saving* sebagai karakter budaya Asia yang identik dengan penghindaran konflik. Menurutnya, pendekatan tersebut terlalu menyederhanakan fungsi politik dari *face-saving*. Melalui kajian terhadap praktik diplomasi ASEAN, Nair menunjukkan bahwa *face-saving* merupakan mekanisme sosial dan politik untuk menjaga legitimasi, mempertahankan hubungan antarpihak, serta mereproduksi keteraturan dalam sistem diplomatik. Dalam konteks tersebut, *face-saving* memungkinkan aktor politik mempertahankan otoritas tanpa harus menunjukkan konfrontasi terbuka.

Praktik ini juga berfungsi menjaga klaim kesetaraan kedaulatan (*sovereign equality*) di antara negara-negara yang sebenarnya memiliki kapasitas dan posisi internasional berbeda. Oleh karena itu, *face-saving* tidak hanya berkaitan dengan perlindungan citra personal, tetapi juga strategi mempertahankan legitimasi dalam relasi kuasa yang tidak setara (Nair, 2019). Pemahaman ini memperluas relevansi *face-saving* dari interaksi antar individu menuju perilaku politik dan diplomasi negara. Politik luar negeri dapat dipandang sebagai arena tempat legitimasi diproduksi, dipertahankan, dan dipertunjukkan melalui simbol maupun tindakan diplomatik.

## 2. Politik Luar Negeri sebagai Performa Politik dan Produksi Kekuasaan

Kajian politik luar negeri secara tradisional lebih banyak menjelaskan perilaku negara melalui kepentingan nasional, distribusi kekuatan, atau tekanan sistem internasional. Perspektif tersebut mengasumsikan bahwa negara bertindak secara rasional untuk mencapai tujuan strategis tertentu. Namun, pendekatan yang hanya berfokus pada hasil kebijakan sering kali kurang memperhatikan dimensi simbolik dalam praktik politik luar negeri.

Dalam perkembangan studi kontemporer, diplomasi dipahami tidak semata sebagai proses negosiasi atau instrumen pencapaian kepentingan, tetapi juga sebagai praktik representasi. Aktivitas diplomatik seperti kunjungan kenegaraan, pertemuan bilateral, pidato internasional, maupun respons terhadap kritik, mengandung makna simbolik yang dapat membentuk persepsi mengenai legitimasi dan otoritas politik.

Karim (2021) menjelaskan bahwa legitimasi peran internasional suatu negara dibangun melalui proses *role legitimation*, yaitu bagaimana negara membentuk identitas dan memperoleh pengakuan atas posisi yang ingin dijalankannya di sistem internasional. Dalam konteks Indonesia, legitimasi tersebut tidak hanya berasal dari kemampuan material, tetapi juga dari keberhasilan membangun narasi dan justifikasi atas peran internasional yang diambil. Pandangan tersebut mengindikasikan bahwa politik luar negeri dapat berfungsi sebagai arena performatif. Pemimpin politik tidak hanya menjalankan diplomasi untuk menghasilkan kebijakan, tetapi juga untuk menampilkan kapasitas kepemimpinan, memperoleh pengakuan, dan mempertahankan legitimasi di hadapan audiens domestik maupun internasional. Dengan demikian, performa politik dalam diplomasi bukan sekadar pencitraan, tetapi bagian dari proses produksi legitimasi yang memiliki konsekuensi terhadap posisi aktor politik dalam struktur kekuasaan.

Peran pemimpin dalam membentuk politik luar negeri telah lama menjadi perhatian dalam kajian politik luar negeri. Singer (1961) menjelaskan bahwa perilaku negara dapat

dianalisis melalui berbagai tingkat analisis, termasuk individu sebagai pengambil keputusan. Perspektif ini membuka ruang untuk memahami bagaimana karakter, preferensi, dan persepsi pemimpin memengaruhi arah kebijakan luar negeri.

Selanjutnya, Hermann (2001) menunjukkan bahwa struktur pengambilan keputusan dan gaya kepemimpinan menentukan bagaimana kebijakan luar negeri dirumuskan dan dijustifikasi. Dalam sistem presidensial, konsentrasi kekuasaan eksekutif memungkinkan pemimpin memainkan peran lebih dominan dalam membentuk narasi politik luar negeri. Kondisi tersebut semakin relevan dalam lingkungan politik kontemporer yang ditandai oleh meningkatnya personalisasi kepemimpinan. Diplomasi sering kali direpresentasikan melalui figur pemimpin negara sehingga batas antara kepentingan institusional dan citra personal menjadi semakin kabur. Politik luar negeri kemudian tidak hanya mencerminkan posisi negara, tetapi juga menjadi medium reproduksi legitimasi pemimpin.

Kajian politik luar negeri secara tradisional cenderung memahami perilaku negara sebagai respons terhadap kepentingan nasional, distribusi kekuatan, atau tekanan sistem internasional. Perspektif tersebut menempatkan kebijakan luar negeri sebagai hasil kalkulasi strategis yang diarahkan untuk mencapai tujuan material maupun keamanan. Namun, pendekatan semacam ini sering kali kurang memperhatikan dimensi simbolik dalam praktik politik luar negeri, terutama bagaimana tindakan diplomatik digunakan untuk menampilkan identitas, membangun legitimasi, dan mempertahankan otoritas.

Dalam perkembangan studi hubungan internasional kontemporer, politik internasional dipahami tidak hanya sebagai arena kompetisi kepentingan, tetapi juga ruang performatif tempat aktor mempertunjukkan posisi dan klaim kekuasaannya. Braun et al. (2019) menjelaskan bahwa *performance* dalam hubungan internasional merujuk pada tindakan politik yang tidak sekadar merepresentasikan realitas, tetapi turut membentuk makna, identitas, dan legitimasi aktor. Dengan demikian, tindakan diplomatik memiliki dimensi performatif karena mampu menghasilkan pengakuan (*recognition*), memperkuat otoritas, serta membangun persepsi tertentu mengenai posisi aktor dalam sistem internasional.

Pendekatan performatif menempatkan diplomasi sebagai praktik yang mengandung simbol, narasi, dan representasi. Pertemuan bilateral, pidato internasional, kunjungan kenegaraan, maupun respons terhadap isu global tidak hanya dipahami sebagai instrumen kebijakan, tetapi juga sebagai bentuk pertunjukan politik (*political performance*) yang ditujukan kepada berbagai audiens. Audiens tersebut mencakup negara lain, masyarakat domestik, elite politik, hingga komunitas internasional yang menjadi sumber pengakuan terhadap legitimasi suatu negara atau pemimpin. Penelitian Friedrichs (2016) menemukan kebanggaan (*honor*) adalah sifat diri yang bersifat instrinsik namun bisa dipertaruhkan.

Braun et al. (2019) menekankan bahwa performa politik memiliki konsekuensi terhadap produksi kekuasaan karena otoritas sering kali bergantung pada kemampuan aktor mempertahankan citra dan memperoleh pengakuan dari pihak lain. Dalam konteks ini, kekuasaan tidak semata dihasilkan melalui kemampuan material, tetapi juga melalui keberhasilan mempertunjukkan identitas, status, dan kapasitas kepemimpinan. Oleh sebab itu, performa politik dapat dipahami sebagai mekanisme reproduksi legitimasi.

Pemahaman tersebut relevan untuk menjelaskan dinamika politik luar negeri yang semakin dipersonalisasi. Ketika diplomasi direpresentasikan melalui figur pemimpin, batas antara kepentingan negara dan citra kepemimpinan menjadi semakin kabur. Politik luar negeri kemudian tidak hanya berfungsi menghasilkan kebijakan eksternal, tetapi juga menjadi medium penampilan kapasitas kepemimpinan, penguatan legitimasi domestik, dan pembentukan status internasional.

Dalam konteks penelitian ini, perspektif performativitas membantu menjelaskan bahwa politik luar negeri Prabowo Subianto tidak cukup dipahami sebagai respons terhadap lingkungan geopolitik semata. Intensitas diplomasi, keterlibatan langsung dalam isu

internasional, maupun pengelolaan kritik terhadap kebijakan luar negeri dapat dibaca sebagai bentuk *political performance* yang bertujuan mempertahankan otoritas dan memperkuat legitimasi kepemimpinan.

Dengan demikian, konsep *face-saving* dan performa politik memiliki hubungan yang saling melengkapi. Jika *face-saving* menjelaskan mekanisme mempertahankan legitimasi ketika menghadapi ancaman terhadap otoritas, maka perspektif performativitas menjelaskan bagaimana legitimasi tersebut diproduksi dan dipertunjukkan melalui praktik politik luar negeri. Integrasi kedua konsep tersebut memungkinkan analisis yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara diplomasi, simbol kekuasaan, dan reproduksi legitimasi politik.

Berbagai penelitian sebelumnya telah membahas *face-saving* dalam diplomasi (Nair, 2019), legitimasi peran internasional Indonesia (Karim, 2021), maupun pengaruh kepemimpinan terhadap kebijakan luar negeri (Hermann, 2001). Akan tetapi, kajian yang menghubungkan ketiga aspek tersebut, yakni *face-saving*, legitimasi kepemimpinan, dan performa politik luar negeri, masih terbatas. Sebagian besar studi mengenai politik luar negeri Indonesia berfokus pada orientasi geopolitik, perilaku *middle power*, atau strategi diplomasi. Sementara itu, politik luar negeri sebagai praktik simbolik yang digunakan untuk mempertahankan legitimasi pemimpin relatif belum banyak dieksplorasi.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini menempatkan *face-saving politics* sebagai kerangka analisis untuk memahami bagaimana politik luar negeri dijalankan tidak hanya sebagai instrumen pencapaian kepentingan nasional, tetapi juga sebagai mekanisme mempertahankan legitimasi, mengelola kritik, dan menampilkan otoritas politik. Dengan demikian, penelitian ini berupaya memperluas penggunaan konsep *face-saving* dari interaksi diplomatik menuju analisis kepemimpinan dan performa politik luar negeri Indonesia kontemporer.

### C. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif interpretatif untuk memahami bagaimana praktik politik penyelamatan muka (*face-saving politics*) beroperasi dalam politik luar negeri Presiden Prabowo Subianto. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian tidak bertujuan menguji hubungan kausal antarvariabel, melainkan menafsirkan makna, simbol, serta pola legitimasi yang muncul dalam praktik politik luar negeri. Dalam penelitian ini, politik luar negeri dipahami tidak hanya sebagai instrumen pencapaian kepentingan nasional, tetapi juga sebagai arena produksi legitimasi, representasi kekuasaan, dan performa kepemimpinan.

Desain penelitian yang digunakan adalah studi kasus interpretatif, dengan fokus pada dinamika politik luar negeri pada awal pemerintahan Prabowo Subianto. Pendekatan studi kasus dipilih karena memungkinkan analisis mendalam terhadap fenomena politik dalam konteks tertentu serta membantu menjelaskan hubungan antara tindakan diplomatik, legitimasi politik, dan produksi makna (Yin, 2018). Penelitian ini tidak bertujuan menghasilkan generalisasi universal, tetapi memahami pola dan proses yang membentuk praktik *face-saving* dalam konteks politik luar negeri Indonesia.

Pemilihan kasus dilakukan secara purposive, yaitu berdasarkan relevansi terhadap tujuan penelitian dan kemampuannya menjelaskan praktik *face-saving politics*. Kasus yang dianalisis meliputi: (1) intensitas diplomasi personal Prabowo dengan sejumlah negara besar; (2) kontroversi kebijakan luar negeri yang memunculkan kritik publik, khususnya keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace (BoP); dan (3) respons pemerintah terhadap kritik elite politik maupun diplomat terkait arah politik luar negeri Indonesia.

Sumber data penelitian berasal dari data sekunder yang diperoleh melalui studi dokumentasi. Data mencakup pidato resmi Presiden Republik Indonesia, publikasi pemerintah dan Kementerian Luar Negeri, dokumen kebijakan, laporan lembaga riset, pernyataan tokoh

diplomasi, pemberitaan media kredibel nasional dan internasional, serta artikel ilmiah yang berkaitan dengan politik luar negeri Indonesia, legitimasi politik, *face-saving*, dan performa diplomasi. Penggunaan berbagai sumber dilakukan untuk memperluas perspektif analisis sekaligus meningkatkan kredibilitas temuan.

Analisis dilakukan melalui analisis kasus interpretatif dengan pembacaan wacana politik. Pendekatan ini digunakan untuk memahami bagaimana simbol, narasi, dan representasi dalam praktik diplomasi membentuk legitimasi politik. Pembacaan wacana politik tidak difokuskan pada struktur linguistik secara rinci, tetapi pada bagaimana tindakan, pernyataan resmi, dan respons terhadap kritik diproduksi sebagai makna politik yang berkaitan dengan otoritas dan pengakuan.

Tahapan analisis dilakukan melalui tiga proses. Pertama, mengidentifikasi tema-tema yang berkaitan dengan legitimasi kepemimpinan, pengelolaan kritik, pengakuan internasional, dan representasi otoritas dalam praktik politik luar negeri. Kedua, mengelompokkan peristiwa diplomatik dan respons politik yang menunjukkan fungsi simbolik di luar tujuan kebijakan substantif. Ketiga, menafsirkan pola tersebut menggunakan kerangka *face-saving politics* dan performa politik untuk memahami bagaimana diplomasi digunakan sebagai mekanisme mempertahankan legitimasi serta menampilkan kekuasaan. Untuk meningkatkan kredibilitas analisis, penelitian menerapkan triangulasi sumber, yaitu membandingkan informasi dari dokumen resmi pemerintah, laporan media, publikasi lembaga riset, dan literatur akademik (Creswell & Creswell, 2018). Pendekatan ini dilakukan guna mengurangi ketergantungan pada satu sumber interpretasi serta memastikan konsistensi informasi.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, seluruh data berasal dari sumber terbuka sehingga tidak mencakup wawancara langsung dengan pembuat kebijakan atau dokumen internal pemerintah. Kedua, pendekatan interpretatif membuka kemungkinan subjektivitas dalam proses penafsiran makna politik. Oleh karena itu, temuan penelitian diposisikan sebagai upaya memahami pola legitimasi dan performa kekuasaan dalam politik luar negeri, bukan generalisasi terhadap seluruh praktik diplomasi Indonesia.

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Politik Luar Negeri sebagai Performa Kekuasaan

Salah satu karakter menonjol dalam politik luar negeri pada awal pemerintahan Prabowo Subianto adalah meningkatnya personalisasi diplomasi. Keterlibatan langsung presiden dalam berbagai agenda internasional memperlihatkan kecenderungan *leader-driven diplomacy*, yaitu situasi ketika representasi kebijakan luar negeri semakin melekat pada figur pemimpin. Dalam konteks ini, diplomasi tidak hanya berfungsi sebagai instrumen kebijakan, tetapi juga menjadi medium penampilan kapasitas kepemimpinan.

Pendekatan diplomasi personal terlihat melalui intensitas interaksi Prabowo dengan sejumlah pemimpin negara besar sejak sebelum dilantik sebagai presiden hingga awal pemerintahannya. Hubungan langsung dengan aktor internasional diposisikan sebagai cara memperluas pengaruh sekaligus menunjukkan posisi Indonesia dalam dinamika geopolitik global. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa aktivitas diplomatik menghasilkan makna simbolik berupa pengakuan (*recognition*) terhadap pemimpin maupun negara.

Dalam perspektif analisis kebijakan luar negeri, meningkatnya dominasi individu dalam diplomasi memperbesar kemungkinan bahwa kebijakan luar negeri berfungsi sekaligus sebagai representasi identitas dan legitimasi pemimpin (Singer, 1961). Dengan demikian, politik luar negeri tidak sepenuhnya dipahami sebagai tindakan institusional negara, tetapi juga sebagai arena reproduksi otoritas politik. Temuan ini sejalan dengan Karim (2018) yang menjelaskan bahwa negara middle power cenderung membangun status internasional melalui pencarian pengakuan dan legitimasi. Politik luar negeri kemudian memiliki fungsi ganda yaitu mencapai kepentingan eksternal sekaligus memperkuat legitimasi internal.

## 2. Diplomasi sebagai Performa Politik dan Produksi Citra Kekuasaan

Hasil analisis menunjukkan bahwa politik luar negeri pada awal pemerintahan Prabowo Subianto tidak hanya dijalankan sebagai instrumen hubungan antarnegara, tetapi juga berfungsi sebagai arena performatif yang menghasilkan citra kepemimpinan dan legitimasi politik. Intensitas kunjungan internasional, pertemuan dengan pemimpin negara besar, serta keterlibatan langsung dalam isu keamanan dan konflik global memperlihatkan bahwa diplomasi semakin direpresentasikan melalui figur presiden. Salah satu dampaknya adalah kebijakan politik luar negeri Indonesia terjebak ke dalam multi-alignment dilemma (Umar, 2026).

Sejak ditetapkan sebagai presiden terpilih hingga awal masa pemerintahannya, Prabowo melakukan serangkaian kunjungan luar negeri ke berbagai negara dan bertemu dengan sejumlah kepala negara, termasuk pemimpin Amerika Serikat, Tiongkok, Rusia, Turki, dan negara-negara Timur Tengah. Data menunjukkan bahwa dalam satu tahun pemerintahannya, Prabowo telah melakukan 32 kunjungan kenegaraan ke 22 negara (CNBC, 2025). Fenomena ini memperlihatkan intensitas diplomasi personal yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah politik luar negeri Indonesia. Dalam hubungan internasional, nilai diri (*self-worth*) merupakan faktor yang mampu menjelaskan motivasi seorang pemimpin dalam kebijakan luar negeri (Friedrichs, 2016). Pertaruhan citra ini membutuhkan pengakuan dari lingkaran terdekat, atasan dan juga bawahan. Di sebuah sistem demokrasi presidensial seperti di Indonesia, sejatinya rakyat memegang mandat dan kekuasaan politik tertinggi. Akan tetapi, seringkali setelah pemilu usai rakyat menjadi bawahan yang hanya dipertontonkan akrobat politik. Tingginya intensitas diplomasi personal ini menunjukkan kecenderungan leader-centered diplomacy, yaitu situasi ketika representasi politik luar negeri semakin bergantung pada figur pemimpin. Dalam kondisi tersebut, diplomasi menghasilkan fungsi simbolik berupa pengakuan (*recognition*) terhadap posisi pemimpin dan negara.

Pendekatan semacam ini dapat dipahami melalui perspektif performativitas dalam hubungan internasional. Braun et al. (2019) menjelaskan bahwa tindakan politik tidak hanya merefleksikan identitas dan kekuasaan, tetapi turut membentuk serta mempertunjukkan keduanya di hadapan audiens. Dengan demikian, diplomasi tidak hanya menghasilkan kebijakan eksternal, tetapi juga memproduksi makna mengenai kapasitas kepemimpinan, status internasional, dan legitimasi politik. Dalam konteks penelitian ini, interaksi langsung dengan pemimpin negara besar memiliki nilai simbolik yang melampaui substansi pertemuan diplomatik. Pertemuan bilateral dapat dipahami sebagai bentuk political performance karena menunjukkan akses terhadap pusat-pusat kekuasaan global sekaligus menampilkan Indonesia sebagai aktor yang memiliki posisi penting dalam relasi internasional (Sulaiman, 2025). Diplomasi kemudian berfungsi sebagai sarana produksi citra kepemimpinan yang aktif, diterima, dan memiliki pengaruh.

Fenomena tersebut sejalan dengan argumentasi Karim (2018) mengenai status-seeking behaviour, di mana negara maupun pemimpin berupaya memperoleh pengakuan melalui visibilitas internasional dan peran yang dimainkan di panggung global. Namun dalam penelitian ini, pengakuan internasional dipahami bukan semata sebagai pencarian status negara, melainkan juga sebagai sumber legitimasi bagi kepemimpinan politik domestik. Fungsi performatif diplomasi semakin terlihat ketika aktivitas internasional dipresentasikan kepada audiens domestik sebagai indikator kapasitas kepemimpinan. Dalam kondisi demikian, keberhasilan menjalin hubungan dengan aktor global dapat dikonversi menjadi legitimasi politik internal. Politik luar negeri tidak lagi hanya diarahkan keluar (*outward-looking*), tetapi juga menghasilkan konsekuensi terhadap persepsi publik di dalam negeri.

Temuan ini menunjukkan bahwa diplomasi pada masa Prabowo beroperasi melalui dua dimensi sekaligus. Pada dimensi eksternal, diplomasi digunakan untuk menjaga relasi

internasional dan memperkuat posisi Indonesia. Sementara pada dimensi domestik, diplomasi berfungsi sebagai performatif politik yang membantu memproduksi citra kepemimpinan dan memperkuat legitimasi otoritas. Dengan demikian, politik luar negeri tidak cukup dipahami sebagai respons terhadap dinamika geopolitik atau kepentingan nasional semata. Diplomasi juga menjadi arena simbolik tempat kekuasaan dipertunjukkan (*performing power*), legitimasi diproduksi, dan kepemimpinan memperoleh pengakuan. Perspektif ini memperjelas hubungan antara *face-saving* dan *political performance*: jika *face-saving* menjelaskan bagaimana legitimasi dipertahankan ketika menghadapi ancaman, maka performatif politik menjelaskan bagaimana legitimasi tersebut dibangun dan ditampilkan melalui praktik diplomasi.

### 3. Board of Peace dan Politik Penyelamatan Muka

Kasus keterlibatan Indonesia dalam *Board of Peace* (BoP) memperlihatkan bagaimana *face-saving politics* beroperasi dalam praktik politik luar negeri. Kebijakan Indonesia untuk bergabung dalam inisiatif tersebut memunculkan kritik dari sejumlah tokoh diplomasi karena dinilai berpotensi menimbulkan ambiguitas terhadap posisi Indonesia terkait konflik Palestina. Setelah mengadakan pertemuan dengan mantan menteri luar negeri, diplomat senior, dan tokoh masyarakat, Presiden Prabowo menjelaskan bahwa keterlibatan Indonesia dalam BoP dilakukan dengan prinsip kehati-hatian serta tetap menempatkan kepentingan nasional sebagai prioritas utama. Pemerintah juga menegaskan bahwa Indonesia dapat menarik diri apabila partisipasi tersebut tidak lagi sejalan dengan kepentingan nasional maupun kepentingan rakyat Palestina (Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 2025).

Dalam pertemuan tersebut, mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal menyampaikan bahwa pendekatan yang diambil pemerintah mencerminkan pilihan realistik dalam situasi konflik yang kompleks (Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 2025). Sebelumnya, Dino memberikan kritik yang sangat tajam atas keputusan pemerintah untuk bergabung pada BoP. Perubahan posisi dari kritik menuju dukungan yang lebih moderat penting dianalisis bukan sebagai perubahan pandangan personal semata, tetapi sebagai proses konsolidasi legitimasi.

Menurut Nair (2019), *face-saving* dalam diplomasi berfungsi menjaga keteraturan sosial dan menghindari konfrontasi terbuka yang dapat mengganggu legitimasi aktor politik. Dalam kasus BoP, ancaman terhadap legitimasi kebijakan luar negeri berpotensi berkembang menjadi ancaman terhadap legitimasi kepemimpinan. Oleh karena itu, respons pemerintah tampak diarahkan pada pembentukan kembali konsensus elite melalui konsultasi dan klarifikasi kebijakan. Temuan ini menunjukkan bahwa *face-saving* tidak hanya berkaitan dengan perlindungan citra personal, tetapi juga mekanisme mempertahankan legitimasi politik ketika kebijakan menghadapi resistensi.

### 4. Konsolidasi Elite dan Pengelolaan Kritik

Kasus *Board of Peace* (BoP) menunjukkan pola yang lebih luas dalam pengelolaan kritik terhadap kebijakan luar negeri. Pemerintah melakukan konsultasi dengan berbagai kelompok elite, termasuk diplomat senior dan tokoh masyarakat, sebelum menegaskan posisi resmi Indonesia (Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 2025). Pendekatan tersebut memperlihatkan bahwa legitimasi kebijakan luar negeri diproduksi melalui pembentukan konsensus, bukan hanya melalui efektivitas kebijakan itu sendiri. Prabowo juga menyatakan bahwa keputusannya untuk bergabung BoP merupakan kekhawatiran bahwa posisi non-blok Indonesia yang rentan (Mardianti, 2026).

Dalam perspektif *face-saving*, pengelolaan kritik memiliki fungsi mempertahankan stabilitas legitimasi. Nair (2019) menjelaskan bahwa praktik *face-saving* membantu mencegah disrupsi terhadap tatanan sosial dan relasi kekuasaan yang telah terbentuk. Jika diterapkan pada konteks domestik, konsolidasi elite memungkinkan pemerintah menjaga otoritas tanpa

memperluas konflik politik secara terbuka. Dengan demikian, *face-saving* beroperasi pada dua level sekaligus: menjaga citra negara di tingkat internasional dan mempertahankan legitimasi pemimpin di tingkat domestik.

### 5. Menampilkan Kesetaraan Kedaulatan Melalui Diplomasi

Temuan lain menunjukkan bahwa diplomasi Prabowo sering menampilkan Indonesia sebagai aktor yang memiliki posisi setara dengan negara-negara besar. Dalam kerangka *face-saving diplomacy*, praktik tersebut dapat dipahami sebagai *performance of sovereign equality*, yaitu upaya mempertahankan klaim kesetaraan meskipun sistem internasional bersifat hierarkis (Nair, 2019). Pemerintah Indonesia secara resmi menegaskan bahwa partisipasi dalam BoP dilakukan tanpa mengubah prinsip dasar politik luar negeri Indonesia dan tetap mempertahankan independensi pengambilan keputusan (Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 2025). Penegasan semacam itu penting secara simbolik karena menunjukkan upaya mempertahankan citra otonomi dan kesetaraan di tengah keterlibatan dengan inisiatif internasional.

Laporan Reuters juga menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia menyatakan kesediaan menarik diri dari BoP apabila keterlibatan tersebut tidak memberikan manfaat terhadap perjuangan Palestina (Reuters, 2026). Pernyataan tersebut memperkuat narasi bahwa Indonesia tetap mempertahankan posisi independen dalam diplomasi internasional. Dalam konteks ini, diplomasi tidak hanya menghasilkan keputusan kebijakan, tetapi juga memproduksi simbol kedaulatan dan legitimasi.

### 6. Keanggotaan BRICS dan Politik Pengakuan Internasional

Keputusan Indonesia bergabung sebagai anggota penuh BRICS pada awal pemerintahan Prabowo Subianto menjadi salah satu langkah politik luar negeri yang memperlihatkan dimensi simbolik dari diplomasi kontemporer Indonesia. Pemerintah Indonesia menyatakan bahwa keanggotaan BRICS dipandang sebagai strategi memperkuat kerja sama dengan negara-negara Global South sekaligus meningkatkan kontribusi Indonesia dalam reformasi tata kelola global. Keputusan tersebut secara resmi diumumkan setelah Indonesia diterima sebagai anggota penuh BRICS pada Januari 2025 (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2025). Pemerintah juga menekankan bahwa keterlibatan Indonesia dalam BRICS tidak bertentangan dengan prinsip bebas aktif, tetapi justru diposisikan sebagai upaya memperluas ruang diplomasi dan memperkuat posisi Indonesia dalam forum internasional. Pernyataan resmi Presiden pada KTT BRICS 2025 menyebutkan bahwa keanggotaan Indonesia diharapkan mampu meningkatkan posisi strategis Indonesia di tingkat global serta memperkuat peran negara berkembang dalam tata kelola internasional (Sekretariat Presiden Republik Indonesia, 2025).

Dalam perspektif *political performance*, keanggotaan BRICS dapat dipahami bukan semata sebagai pilihan institusional, tetapi juga sebagai tindakan simbolik yang mempertunjukkan posisi Indonesia di hadapan audiens internasional. Braun et al. (2019) menjelaskan bahwa performa politik dalam hubungan internasional berfungsi menghasilkan pengakuan, legitimasi, dan identitas aktor. Dengan demikian, partisipasi Indonesia dalam BRICS memiliki makna di luar kerja sama ekonomi atau politik langkah tersebut turut merepresentasikan klaim mengenai status dan relevansi Indonesia dalam tatanan global karena Indonesia berusaha terlihat independen di hadapan berbagai blok kekuatan (Utama, 2025).

Argumen tersebut sejalan dengan Karim (2018) yang menyatakan bahwa negara mencari legitimasi internasional melalui pembentukan peran dan pengakuan (*recognition*). Dalam konteks ini, BRICS menjadi ruang simbolik tempat Indonesia mempertunjukkan dirinya sebagai aktor yang tidak hanya mengikuti dinamika global, tetapi juga berupaya berkontribusi dalam pembentukan agenda internasional (Utama, 2025). Selain itu, keputusan bergabung

dengan BRICS juga memperlihatkan praktik *face-saving* pada level internasional. Keanggotaan dalam forum negara berkembang terbesar dapat dipahami sebagai upaya mempertahankan citra Indonesia sebagai negara yang memiliki posisi strategis dan otonom di tengah kompetisi geopolitik global. Praktik tersebut sesuai dengan konsep *performance of sovereign equality* (Nair, 2019), yaitu upaya aktor mempertahankan klaim kesetaraan dalam sistem internasional yang bersifat hierarkis.

Dengan demikian, keanggotaan BRICS tidak hanya merepresentasikan perubahan orientasi diplomatik, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme produksi legitimasi dan penampilan kekuasaan (*performing power*). Politik luar negeri kemudian menjadi arena tempat status internasional dipertunjukkan sekaligus dipertahankan.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa *face-saving politics* dalam politik luar negeri Prabowo beroperasi melalui tiga mekanisme utama. Pertama, performa diplomatik, yaitu penggunaan diplomasi personal untuk memperoleh pengakuan dan memperkuat legitimasi kepemimpinan. Kedua, konsolidasi elite, yakni pengelolaan kritik melalui konsultasi dan pembentukan konsensus politik. Ketiga, penegasan kesetaraan kedaulatan, yaitu penggunaan diplomasi untuk mempertahankan citra independensi dan status internasional Indonesia.

Temuan tersebut mengindikasikan bahwa politik luar negeri tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pencapaian kepentingan nasional, tetapi juga sebagai arena mempertahankan legitimasi dan menampilkan otoritas politik. Dengan demikian, *face-saving* dapat dipahami sebagai strategi aktif dalam reproduksi kekuasaan, bukan sekadar upaya menghindari kehilangan muka.

## E. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa politik luar negeri pada masa awal pemerintahan Prabowo Subianto tidak hanya dapat dipahami sebagai instrumen pencapaian kepentingan nasional, tetapi juga sebagai arena simbolik untuk mempertahankan legitimasi politik dan menampilkan otoritas kepemimpinan. Melalui pendekatan *face-saving politics*, penelitian menemukan bahwa praktik politik luar negeri berfungsi dalam proses produksi dan pemeliharaan legitimasi melalui performa diplomatik, konsolidasi elite, serta penegasan posisi Indonesia dalam relasi internasional.

Temuan penelitian memperlihatkan tiga pola utama. Pertama, meningkatnya personalisasi diplomasi dan intensitas keterlibatan presiden dalam hubungan internasional menunjukkan bahwa politik luar negeri beroperasi sebagai performa kepemimpinan yang menghasilkan pengakuan dan legitimasi. Kedua, pengelolaan kritik terhadap kebijakan luar negeri seperti *Board of Peace* (BoP) yang mengindikasikan adanya mekanisme konsolidasi elite yang berfungsi menjaga stabilitas legitimasi politik. Ketiga, diplomasi dengan berbagai aktor internasional merepresentasikan upaya mempertahankan citra kesetaraan kedaulatan (*sovereign equality*) dan status Indonesia sebagai aktor yang memiliki posisi relevan dalam tatanan global seperti yang dilihat dalam keanggotaan Indonesia dalam BRICS.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini berargumen bahwa *face-saving* tidak hanya berfungsi sebagai upaya menghindari kehilangan muka (*loss of face*), tetapi juga sebagai strategi aktif dalam reproduksi kekuasaan dan pemeliharaan otoritas politik. Dengan demikian, konsep *face-saving* dapat diperluas penggunaannya dari konteks interaksi diplomatik menuju analisis legitimasi kepemimpinan dan performa politik luar negeri. Kontribusi utama penelitian ini terletak pada pengembangan perspektif alternatif dalam studi politik luar negeri Indonesia. Jika sebagian besar penelitian sebelumnya berfokus pada aspek geopolitik, orientasi strategis, atau perilaku *middle power*, penelitian ini menunjukkan pentingnya memperhatikan dimensi simbolik, legitimasi, dan performa politik dalam memahami praktik diplomasi kontemporer.

## DAFTAR PUSTAKA

- Braun, B., Schindler, S., & Wille, T. (2019). Rethinking agency in International Relations: Performativity, performances and actor-networks. *Journal of International Relations and Development*, 22(4), 787–807. <https://doi.org/10.1057/s41268-018-0147-z>
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. Sage.
- CNBC Indonesia. (2025). *Setahun Prabowo: 364 hari, 32 kunjungan ke 22 negara, apa hasilnya?*. Diakses dari: <https://www.cnbcindonesia.com/research/20251021171944-128-677981/setahun-prabowo-364-hari-32-kunjungan-ke-22-negara-apa-hasilnya>
- Friedrichs, J. (2016). An intercultural theory of international relations: How self-worth underlies politics among nations. *International Theory*, 8(1), 63–96. <https://doi.org/10.1017/S1752971915000202>
- Goffman, E. (1967). *Interaction ritual: Essays on face-to-face behavior*. Anchor Books.
- Hermann, M. G. (2001). How decision units shape foreign policy: A theoretical framework. *International Studies Review*, 3(2), 47–81. <https://doi.org/10.1111/1521-9488.00234>
- Karim, M. F. (2018). Middle power, status-seeking and role conceptions: The cases of Indonesia and South Korea. *Australian Journal of International Affairs*, 72(4), 343–363. <https://doi.org/10.1080/10357718.2018.1443428>
- Karim, M. F. (2021). Role legitimation in foreign policy: The case of Indonesia as an emerging power under Yudhoyono’s presidency (2004–2014). *Foreign Policy Analysis*, 17(3). <https://doi.org/10.1093/fpa/orab018>
- Laksmana, E. A. (2011). Indonesia’s rising regional and global profile: Does size really matter? *Contemporary Southeast Asia*, 33(2), 157–182. <https://doi.org/10.1355/es33-2a>
- Nair, D. (2019). Saving face in diplomacy: A political sociology of face-to-face interactions in the Association of Southeast Asian Nations. *European Journal of International Relations*, 25(3), 672–697. <https://doi.org/10.1177/1354066118822117>
- Mardianti, D. L. (2026). *Prabowo: Tak Akan Ada yang Bantu kalau Diplomasi Nonblok*. <https://www.tempo.co/politik/prabowo-tak-akan-ada-yang-bantu-kalau-diplomasi-nonblok-2111913>
- Nurgoho, Y. (2026). *Indonesia in 2026: Prabowo’s first real year of ambition and why we should care*. Diakses dari: <https://fulcrum.sg/indonesia-in-2026-prabowos-first-real-year-of-ambition-and-why-we-should-care/>
- Reuters. (2026). *Indonesia says it will withdraw from Board of Peace if participation does not benefit Palestinians*. Diakses dari: <https://www.reuters.com/world/asia-pacific/indonesia-says-will-withdraw-board-peace-if-it-does-not-benefit-palestinians-2026-03-06/>
- Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. (2026). *President Prabowo emphasizes Indonesia’s realistic diplomacy and precautionary principle in joining the Board of Peace*. Diakses dari: <https://setkab.go.id/en/president-prabowo-emphasizes-indonesias-realistic-diplomacy-and-precautionary-principle-in-joining-the-board-of-peace>
- Singer, J. D. (1961). The level-of-analysis problem in international relations. *World Politics*, 14(1), 77–92. <https://doi.org/10.2307/2009557>
- Sulaiman, Y. (2025). *Stratsea. Prabowo’s directionless foreign policy and its consequences*. <https://stratsea.com/prabowos-directionless-foreign-policy-and-its-consequences/>
- Umar, A. R. M. (2026). *Indonesia’s multi-alignment dilemma under Prabowo*. The Interpreter-Lowy Institute.
- Utama, M.A. (2025). *Explaining Indonesia’s multi-alignment policy under Prabowo*. Central European Institute of Asian Studies.
- Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods*. Sage.